

Judul : UU Jaminan produk halal mulai diterapkan, apakah pelaku usaha siap?
Tanggal : Minggu, 18 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

UU Jaminan Produk Halal Mulai Diterapkan, Apakah Pelaku Usaha Siap?

Setelah melewati masa transisi selama kurang lebih 12 tahun sejak disahkan, Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) akan memasuki tahap pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026.

Artinya, setiap produk yang masuk dalam kategori wajib halal harus memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, produk yang tidak halal harus mencantumkan keterangan tidak halal secara jelas, agar dapat diketahui konsumen.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024, kategori produk yang wajib bersertifikat halal mencakup makanan, minuman, bahan baku dan bahan tambahan pangan, hasil perikanan dan jasa penyembelihan, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen

keindahan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetika, serta berbagai barang lainnya.

Kategori barang tersebut meliputi sandang, penutup kepala, aksesoris, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah umat Islam, alat tulis, perlengkapan kantor, hingga alat kesehatan berdasarkan kelas risikonya. Dengan cakupan tersebut, 18 Oktober 2026 menjadi momentum penting untuk mewujudkan program Wajib Halal Oktober (WHO). Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan kesiapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Niti Emilia mengatakan, penerapan kewajiban

sertifikasi halal telah melalui sejumlah tahapan dan tidak dilakukan secara mendadak. Menurut Niti, implementasi kebijakan tersebut telah memasuki fase penerapan sejak 2024 dan akan berlanjut ke tahap berikutnya pada 2026.

"Oktober tahun 2026 kan sekarang untuk segera berlakunya wajib halal," ujar Niti.

Meski demikian, ia mengakui masih banyak pedagang kecil dan pelaku UMKM yang merasa belum siap dengan sosialisasi serta bimbingan teknis yang memadai untuk mengurus sertifikasi halal bagi produk mereka.

Di sisi lain, tuntutan konsumen terhadap kepastian kehalalan produk juga semakin meningkat. Sejumlah konsumen dari kalangan Generasi Z dan milenial mulai mempertanyakan status kehalalan makanan dan minuman, terutama yang dijual di restoran, kafe,

serta gerai makanan kekinian.

Di tengah persiapan implementasi kebijakan tersebut, muncul pula gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh seorang pedagang seblak. Gugatan itu meminta penundaan kewajiban sertifikasi halal beserta penerapan sanksi administratif bagi usaha mikro dan kecil (UMK) hingga Pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai.

Niti mengatakan YLKI masih mengawal perkembangan perkara tersebut. Ia berharap putusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan bagi keberlanjutan usaha UMKM tanpa mengabaikan aspek perlindungan konsumen.

Sementara itu, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi, mendesak agar 18 Oktober 2026 benar-benar menjadi momentum pemberlakuan Wajib Halal Oktober. Ia menilai masa transisi yang telah berlangsung cukup

panjang seharusnya menjadi bekal bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan.

Sebaliknya, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, mengingatkan Pemerintah agar tidak tergesa-gesa menerapkan kewajiban sertifikasi halal kepada UMKM tanpa memastikan kesiapan pelayanan, kemudahan prosedur, serta sosialisasi yang memadai.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya mencari titik temu antara kepastian pelaksanaan regulasi, kesiapan pelaku usaha, dan perlindungan konsumen.

Untuk mengetahui lebih jauh pandangan Tulus Abadi dan Firman Soebagyo mengenai kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku pada 18 Oktober 2026, berikut petikan wawancara dengan keduanya.

FIRMAN SOEBAGYO, Anggota Komisi IV DPR RI

Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Dulu



REDA IT

UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) akan berlaku efektif pada 18 Oktober 2026. Artinya, produk dan pelaku usaha yang masuk dalam kategori wajib halal harus mengantongi sertifikat halal. Bagaimana pendapat Anda?

Tujuan kebijakan ini baik dan mulia. Kita mendukung upaya Pemerintah dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Namun, implementasi kebijakan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus mempertimbangkan kondisi riil pelaku usaha, terutama pedagang kaki lima (PKL), pelaku UMKM, dan pedagang makanan di pasar tradisional.

Apakah sertifikasi halal belum bisa segera dilaksanakan?

Saya mengingatkan Pemerintah agar tidak terburu-buru memberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pedagang mulai 18 Oktober 2026. Pemerintah harus memastikan kesiapan pelaksanaan kebijakan ini sebelum menerapkannya secara menyeluruh.

Mengapa demikian?

Kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi pelaku usaha kecil apabila tidak diimbangi dengan kemudahan pelayanan, sosialisasi yang masif, serta pembelasan biaya pengurusan sertifikat halal.

Pemerintah harus melihat kondisi riil di lapangan dan memahami posisi pelaku usaha. Jika pelaksanaannya tidak dipersiapkan secara matang, kebijakan yang tujuannya baik ini justru dapat menimbulkan masalah baru. Sampai saat ini, proses pengurusan sertifikat halal masih dirasakan relatif sulit oleh sebagian pelaku usaha. Jika kewajiban tersebut dipaksakan tanpa perbaikan pelayanan dan prosedur yang memadai, dampaknya bisa merugikan, terutama bagi PKL dan pedagang makanan di pasar tradisional.

Apa dampak yang dikhawatirkan?

Salah satu dampaknya adalah potensi konflik horizontal apabila kewajiban tersebut diterapkan tanpa kesiapan mekanisme pengawasan dan pemahaman masyarakat yang memadai.

Karena itu, pengangan kebijakan harus didahului dengan sosialisasi dan pendampingan yang cukup. Jangan sampai pedagang kecil menghadapi tekanan hanya karena belum

memahami prosedur sertifikasi halal atau kesulitan mengakses layanan yang disediakan Pemerintah.

Apa pesan Anda kepada Pemerintah?

Saya meminta Pemerintah memastikan seluruh aspek pelaksanaan kebijakan benar-benar siap sebelum kewajiban sertifikasi halal diberlakukan. Kesiapan sistem pelayanan, kemudahan prosedur, serta sosialisasi hingga tingkat desa harus menjadi prioritas.

Jangan tergesa-gesa memberlakukan kebijakan ini jika seluruh perangkat pendukungnya belum benar-benar siap. Pemerintah harus memastikan bahwa pelaku usaha memahami kewajibannya dan memiliki akses yang mudah untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Apa harapan Anda?

Pemerintah harus memastikan proses pengurusan sertifikat halal dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan pelaku usaha. Saya meminta Pemerintah melalui BPJPH memberikan layanan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku UMKM dan pedagang di pasar tradisional. ■ **RED**

TULUS ABADI, Ketua FKBI

Oktober Ini Momentum Penegakan UU JPH



REDA IT

Bagaimana pandangan Anda mengenai pemberlakuan efektif UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada 18 Oktober 2026?

Tanggal 18 Oktober 2026 menjadi momentum untuk mewujudkan Wajib Halal Oktober (WHO). Namun, ada beberapa catatan kritis yang perlu diperhatikan untuk merealisasikan kebijakan tersebut.

Apa saja catatan kritis tersebut?

Pertama, tidak boleh ada relaksasi lagi. Sejak UU JPH disahkan, telah tersedia masa transisi dan relaksasi selama kurang lebih 12 tahun bagi pelaku usaha, baik usaha kecil dan menengah (UKM), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maupun pelaku usaha besar. Oleh karena itu, kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha yang masuk dalam kategori wajib halal harus diwujudkan pada momentum Wajib Halal Oktober, yakni 18 Oktober 2026.

Bagaimana memastikan pelaku usaha menjalankan kebijakan tersebut?

Kami mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

(BPJPH) RI agar bertindak proaktif dan progresif dalam mendorong terwujudnya sertifikasi halal bagi seluruh produsen dan pelaku usaha yang produknya wajib bersertifikat halal. BPJPH harus memastikan kebijakan ini benar-benar terlaksana, bukan sekadar menjadi aturan di atas kertas.

Bagaimana dengan pelaku UMKM?

Pelaku usaha, khususnya yang berskala besar, harus proaktif dan kooperatif dalam menginisiasi sertifikasi halal untuk produknya.

Sementara itu, bagi pelaku UKM dan UMKM, mekanisme sertifikasi halal melalui skema pernyataan pelaku usaha (*self-declare*) dapat mempermudah pemenuhan kewajiban bagi usaha yang memenuhi persyaratan.

Melalui skema ini, sertifikasi halal dapat difasilitasi secara gratis. Jadi, jangan sampai pelaku usaha kecil menanggung kendala biaya sebagai alasan untuk tidak memenuhi

kewajiban sertifikasi halal, terlebih ketika tersedia fasilitas yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.

Bagaimana dengan pelaku usaha besar?

Bagi pelaku usaha besar, seharusnya tidak ada kendala berarti dari sisi biaya. Proses sertifikasi halal bukanlah beban ekonomi yang signifikan bagi perusahaan berskala besar.

Karena itu, mereka seharusnya menunjukkan kepatuhan dan tanggung jawab dengan memastikan produk yang diwajibkan telah memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagaimana dengan pengawasan?

BPJPH bersama aparat berwenang lainnya perlu meningkatkan pengawasan secara berkala atau post-market control terhadap produsen dan pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikat halal.

Saat ini, jumlah sertifikasi halal telah mencapai sekitar 14 juta dengan sekitar 80 persen di antaranya berasal dari sektor UKM dan UMKM. Jumlah tersebut harus ditambah dengan pengawasan yang memadai. ■ **RED**